KINERJA DAN MASALAH EKONOMI INDONESIA (Kuliah III)

Gejolak politik dan Dampak Ekonominya

Ketidak pastian di bidang ekonomi disebabkan oleh ketidakpastian politik dan keamanan yang masih sangat tinggi. Beberapa indikator positip dalam perekonomian dapat terganggu karenanya. Kasus-kasus masalah kemananan seperti contohnya yang terjadi di Ambon dan Aceh, pada gilirannya memberikan kontribusi pada ketidakpastian ekonomi.

Adanya pertarungan politik diantara elit politik dan diikuti oleh berbagai penggunaan hak-hak politik anggota legislatif dengan target tertentu , tentu telah membuat nilai tukar rupiah dan indeks harga saham di pasar modal Indonesia yang merupakan salah satu variable yang cukup menentukan dalam perekonomian nasional cukup merosot.

Kemerosotan nilai rupiah tersebut potensial menimbulkan efek domino yang menyeret pada kemerosotan variable-variable makro ekonomi yang lainnya.Jika yang terjadi adalah nilai rupiah yang merosot, maka inflasi akan meningkat terus, sehingga ekspor akan mengurangi aktivitasnya, kemudian pertumbuhan ekonomi akan melamban, atau bahkan negatif, dan pada gilirannya pengangguran dan kembali kemiskinan akan semakin meluas. Situasi inilah yang terjadi pada bulan Mei 1997, dimana kemerosotan nilai tukar rupiah telah mengimbas pada kemerosotan ekonomi secara keseluruhan yang dibarengi krisis politik dan keamanan. Oleh karena itu tanpa adanya perbaikan dalam perilaku elit politik yang terus saling memainkan kekuasaannya tanpa visi untuk mengeluarkan perekonomian Indonesia dari krisis , maka perekonomian Indonesia potensial memasuki krisis ekonomi berkali-kali.

Namun demikian jika terdapat tanda-tanda pemulihan dalam perekonomian seperti kenaikan konsumsi masyarakat, akan mendorong gairah pada beberapa sektor ekonomi, dan ikut memperceat laju pertumbuhan ekonomi. Faktor ini sebenarnya tidak mudah untuk dipertahankan karena faktor-faktor non eknomi memberikan kontribusi yang cukup besar pula pada proses perlambatan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan negara lain yang dianggap lebih parah krisisnya seperti Thailan, tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat bangkit kembali, Indonesia termasuk tertinggal dalam memulihkan perekonomiannya kembali. Hal yang sama juga terjadi pada negara Korea selatan yang dengan waktu yang tidak terlalu lama bisa melepaskand iri dari krisis ekonomi, dan kemudian tumbuh mendekati dua digit. Sedangkan dilain pihak Indonesia mengalami krisis cenderung berkepanjangan, terjadi tawar-menawar dengan IMF dalam rangka komitmen pinjaman. Akibat dari ketergantungan dengan IMF maka secara faktual seakan kedaulatan eknomi Indoneisa sudah berada di tangan lembaga keuangan Internasional tersebut. Berbagai kebijaksanaan dalam perekonomian waktu itu harus mendapat persetujuan dari IMF.

Ketergantungan tersebut ternyata masih bisa sedikit diatasi dengan adanya oil bom yaitu meningkatnya harga minyak dunia, sehingga arus devisa yang masuk ke anggaran pemerintah meningkat. Sehingga secara umum dapat mengamankan APBN pada kurun

waktu itu. Dan pada gilirannya Indonesia dapat dapat menghentikan kontrak kerja sama dengan IMF mulai Januari 2004, meskipun masih dipantau oleh lembaga Internasional.

Disamping permasalahan diatas ada juga permasalahan lainnya yaitu masalah restrukturisasi perbankan. Ada lembaga yang disebut sebagai BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) yang diharapkan dapat menyehatkan perbankan nasional, tetapi malah sebaliknya terjebak dalam ketidaksehatan internalnya. Dengan tingkat otonomi yang tinggi ternyata tetap sulit untuk melakukan peran utamanya dalam menstrukturisasi sektor perbankan nasional.

Kelemahan Struktural

Jika melihat secara struktural dan dari indikator yang ada dalam struktur bisnis dan ekonomi Indonesia, maka kelemahannya adalah dalam struktur ekonominya. Jadi kita tidak dapat menyalahkan faktro lain seperti ketidakpastian politik, hukum, dan keamanan saja, tetapi kita juga harus memperhatikan variable-variable ekonominya itu sendiri.Dalam level mikro ketidak efisienan manajemen perusahaan dalam mengelola aktivitasnya merupakan hal yang sering terjadi pula. Banyak perusahaan-perusahaan sering terjadi terjadi ketidak stadarana kualitas dan pelayanan yang kurang profesional. Sehingga daya saingnya terhadap negara dibandikan negara-negara lainnya bahkan di Asia tenggara.

Untuk mengukur daya saing ada berbagai variable yang diteliti y ang kemudian dibuat indeks dayasaing (competitiveness index)

Sementara itu BUMN yang diharapkan menjadi agen of development ternyata sebagian besar berada pada posisi yang tidak sehat atau kurang sehat.Lemahnya kemampuan manajemen, dan intervensi birokrasi yang masih sangat besar pada BUMN merupakan faktor dominan yang menyebabkan BUMN dengan modal besar tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Masalah semakin berat dengan adanya indikasi-indikasi mencuatnya sinyalemen kembali maraknya permasalahan korupsi dsb.

Kendala Program pemulihan Ekonomi

Ketidakpastian yang sering terjadi di bidang politik dan keamanan di Indonesia maka keraguan para investor untuk melakukan penanaman modal masih akan berlanjut. Dan ini membahayakan proses pemulihan ekonomi kita yang sejauh ini didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga. Selama kenaikan konsumsi ini masih bisa diimbangi kapasitas produksi yang ada dan yang menganggur, maka pertumbuhan masih bisa berlanjut. Namun pertumbuhan ekonomi yang didorong permintaan konsumsi ini akan tersendat apabila kapasitas yang ada sudah penuh, dan tidak ada tambahan investasi baru yang memadai. Akibatnya ancaman inflasi sangat tinggi pada masa masa mendatang.

Inilah persoalan yang kita hadapi ke depan, yaitu meningkatnya sisi supply yang memerlukan adanya peningkatan investasi tersebut. Mekanisme sisi supply ini tidak berfungsi seperti yang seharusnya, sebagai akibat dari kerusakan kelembagaaan yang cukup parah dan menyebabkan daya respon (elastis) supply sangat merosot. Untuk mendorong bangkitnya investasi swasta dan ekspor sangat bergantung pada keberhasilan

mengembalikan kepercayaan investor dan menghilangkan pada sisi supply tersebut. (Boodiono, 2000 h, 2).

Secara umum potensi untuk pemulihan ekonomi dapat terwujud jika stabilitas variable non-ekonomi tetap terjaga. Dari telaah yang dilakukan Internation Institute f Management Development (IMD) yang berpusat di Switzerland menyimpulkan bahwa tingkat daya saing Indonesia sangat rendah. Peringkat daya saing yang dihitung dengan mencakup 290 variable, sehingga cukup akurat untuk menilai derajat dayasaing anntar negara tersebut. Pada tahun 1999 Indoneisa berada pada posisi nomor 47 dan 49 pada tahun 2001, Pada tahun 2002 posisi Indonesia hanya naik satu tingkat dibanding tahun sebelumnya yaitu peringkat 48 dari 49 negara.Tahun 2003 berada pada posisi 57 dari 59 negara. Lemahnya daya saing ini jelas berarti pada era keterbukaan ekonomi dapat berimplikasi pada sulitnya produk Indonesia masuk negara lain, dan terancamnyanya pasar domestik oleh produk asing, termasuk sektor perbankan.

Kinerja Ekonomi Indonesia di Tengah Ekonomi Dunia.

Dari survey yang dilakukan tahun 2001 riset tentang indeks korupsi dunia yang dilakukan oleh lembaga Transparency International (IT), telah menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia, yaitu bahwa dari 91 negara yang disurvey, Indonesia menempati posisi keempat paling korup setelah Bangladesh, Nigeria dan Uganda. Data tersebujt menggambarkan terus bertahannyha Indonesia sebagai negara korup di dunia, memberikan peringatan akan perlunya langkah serius yang jelas dan tegas untuk menurunkan korupsi tersebut. Langkah tegas ini tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum yang tegas dan keras, melainkan juga menyangkut pemberian kontraprestasi yang memadai bagi pekerja, khususnya pegawai pemerintah, sehingga menekan minat untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaaan yang merugikan masyarakat luas.

Data keburukan Indonesia semakin bertambah panjang jka belihat julukan lainnya seperti negara yang paling tinggi tingkat pembajakan hak milik, misalnya pembajakan milik intelektual, foto kopi, buku, kaset, software komputer yang berlangsung dengan mudah. Ada julukan sebagai negara berkembang pengutang terbesar di dunia.Dengan utang luar negeri pemerintah dan swasta yang mencapai sekitar 140 milar dolar amerika (2004), telah menimbulkan beban berat bagi perekonomian.

Laporan Pembangunan Manusia 1999 dari UNDP menyimpulkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada peringkat 105 dari 174 degara yang disurvey. Survey terbatu tahun 2000 mengalami penuruna menjadi peringkat 109 yang menunjukkan pembangunan kualitas SDM di Indoneisa semakin tertinggal jauh dari negara lainnya. Pada tahun 2002 dan 2003 menurun kembali peringkatnya menjadi 110 dari 173 negara dan 112 dari 175 negara. Posisi Indonesia berada di bawah negara-negara seperti Suriname, tunisia, Sri langka, ataupun Vietnam. Rendahnya IPM tidak terlepas dari rendahnya anggaran untuk bidang tersebut. Misalnya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan

posisinya sangat kecil (1,4 % dari GNP) lebih rendah dibandingkan Pakistan (1,4%), Sri langka (3,4%) dan China (2,3%).

Reformasi dari sisi ekonomi pada hakikatnya adalah upaya mengoptimalkan produktivitas semua faktor produksi yang ada. Reformasi ini termasuk dalam lembaga-lembaga ekonomi yang ada yang kinerjanya tidak bagus.Banyak sekali BUMN dengan berbagai fasilitasnya ternyata malah menjadikannya banyak yang tidak sehat. Lembaga usaha swasta besar, yang merajai perekonomian, ternyata hanya semu perkembangannya dan banyak mengandalkan fasilitas. Lembaga perbankan yang merupakan jantung perekonomian juga rapuh. Bank pemerintah masih dikendalikan birokrasi, bank swasta juga dikelola pemilik yang berjiwa petualan, memanfaatkan bank tersebut untuk memperoleh dana murah atau menjadi kasir kelompok usahanya.

Ketidak beresan ini pula dapat dilihat dari BBPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) , unit ekonomi yang fungsinya untuk menyehatkan perbankan dan menguasai ratusan trilliun asset negara, ternyata masih dipertanyakan pula kesehatannya.

Mencari Bentuk Sistem Ekonomi Indonesia

Menurut John F due, manakala kita berbicara tentang Sistem Ekonomi sama artinya berbicara tentang segala aspek yang berkaitan dengan perilaku hidup dan kehidupam masyarakat. Karena suatu sistem merupakan keseluruhan lembaga yang hidup dalam suatu masyarakat yang dijadikan tuntutan oleh masyarakat tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks perekonomian, sistem ini menjadi dasar atau tuntutan yang digunakan untuk menjawab persoalan eknomi yang ada dalam suatu masyarakat, paling tidak ada ada tiga persoalan utama yang harus dipercaya oleh sistem tersebut :

1. Barang dan jasa apa yang akan dihasilkan dan berapa jumlahnya
2. Bagaimana pola dan cara memproduksi barang dan jasa itu
3. Untuk siapa barang tersebut dihasilkan dan bagaimana mendistribusikan barang tersebut ke masyarakat.

Masalah utama yang perlu dijawab adalah outpun apa yang akan dihasilkan. Dalam perekonomian kita, barang yang harus mendapat prioritas utama untuk diproduksi adalah barang dan jasa menyankut kebutuhan dasar dan memberikan manfaat bagi kepentingan hidup orang banyaak, seperti sarana jalan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Akan tetapi ini tidak dimaksudkan bahwa jenis produksi diluar yang disebutkan diata menjadi tidak boleh diproduksi. Sebab apabila produksi melulu pada barang-barang primer, maka bangsa kita masih tetap terbelakang. Potensi yang ada baik sumber daya manusianya maupun sumberdaya alamnya akan tetap tidak terolah. Hal ini jelas tidak sesuan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Karena itu barang dan jasa sekunder maupun tersier tetap perlu dikembangkan. Hanya saja dalam pengembangan produk yang demikian

jangan sampai mengorbankan produk yang menyangkut kebutuhan pokok sebagian besar manusia itu.

Berapa banyak output tersebut harus dihasilkan? Pertama-pertama minimal segenap anggota masyarakat terpenuhi kebutuhan pokoknya. Jika sudah tercukupi maka selanjutnya orientasi produk diarahkan pada permintaan pasar secara global dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Jika melihat penjelasan Pasal 33 UUD 45, secara terurat : ...kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Penjelasan ini mengandung makna bahwa koperasi seharusnya menjadi unit usaha yang dominan dalam sistem ekonomi Indonesia. Namun demikian sangat ironis bahwa dalam kenyataannya koperasi tertinggal jauh dibandingkan sektor lainnya.

Selanjutnya permasalahan yang dihadapi adalah menentukan untuk siapa barang yang dihasilkan itu dihasilkan dan bagaimana pendistribusiannya. Berdasarkan orientasi produksi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial maka produksi yang kita hasilkan seharusnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, buka untuk segelintir orang yang kebetulan mempunyai daya beli yang berlebihan. Disamping itu pendistribusian produksi itu juga harus bersifat adil, sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.

Makna kata adil kiranya lebih tepat jika dikatanan bahwa kebutuhan pokok sudah terpenuhi secara layak, dan setela itu barulah kebutuhan lainnya didsarkan atas sumbangannya atas proses produksi.